

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan farmasi merupakan salah satu pelayanan kesehatan di Indonesia yang telah mengalami perubahan orientasi dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Kegiatan pelayanan farmasi yang semula berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi harus diubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup pasien. Dua puluh lima persen kesembuhan pasien diharapkan diperoleh dari kenyamanan serta baiknya pelayanan apotek, sedangkan 75% berasal dari obat yang digunakan pasien (Ihsan dkk., 2014).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Menkes RI, 2017). Dengan begitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang ada di Apotek.

Tenaga kefarmasian harus memberikan pelayanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek dan juga mengurangi risiko terjadinya *medication error*. Terdapat kesepakatan bahwa mutu pelayanan kesehatan dititikberatkan pada kebutuhan dan tuntutan pengguna jasa yang berkaitan dengan kepuasan pasien sebagai konsumen. Pelayanan yang

bermutu selain berdasarkan kepuasan konsumen juga harus sesuai dengan standar dan kode etik profesi (Diarti dkk., 2014).

Untuk menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah ditetapkan standar pelayanan farmasi di apotek dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Menkes RI, 2016). Pentingnya pelayanan kefarmasian dalam meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kefarmasian di apotek, menuntut pemberi layanan apotek untuk dapat memenuhi standar yaitu mampu melakukan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta standar pelayanan farmasi klinik.

Berdasarkan uraian tersebut, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai instansi pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan pendidikan khususnya dalam bidang kefarmasian memiliki upaya memberikan pengalaman kerja nyata atau biasa disebut dengan praktek kerja lapangan (PKL) untuk menciptakan Tenaga Teknis Kefarmasian yang mampu memenuhi Standar Pelayanan Kefarmasian di Komunitas (Apotek).

1.2 Tujuan

A. Tujuan Umum Praktek Kerja Lapangan

Agar mahasiswa dapat mengaplikasikan kompetensi yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada dunia kerja sesuai dengan kondisi di tempat kerja.

B. Tujuan Khusus Praktek Kerja Lapangan

1. Memahami dan melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek

2. Melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat

a) Bagi mahasiswa

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan langsung bekal ilmu dan pengetahuan dalam dunia kerja.
2. Mahasiswa mengetahui tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan pemahaman, kreativitas serta kinerja praktek mahasiswa dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

b) Bagi Institusi Pendidikan

1. Menciptakan kerja sama dengan institusi tempat PKL.
2. Menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi terkhusus untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh institusi tempat PKL.
3. Mengetahui, memahami dan mengusai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perbekalan farmasi di apotek.

c) Bagi Institusi Tempat PKL

1. Menjadi bahan masukan bagi apotek untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan di masa akan datang, berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa selama PKL.